



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

2022

PERIODE TAHUN 2022

LAPORAN KEUANGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor KPU Kabupaten Solok adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor KPU Kabupaten Solok mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor KPU Kabupaten Solok. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Koto Baru, Januari 2023
Sekretaris,

EFRIZON, SH, M.Si
NIP. 19660920 198602 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
F. Pengungkapan Penting Lainnya	49
VI. Lampiran dan Daftar	iv

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor KPU Kabupaten Solok yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Koto Baru, Januari 2023

Sekretaris,

EFRIZON, SH, M.Si
NIP. 19660920 198602 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor KPU Kabupaten Solok Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 206.207.208,- atau mencapai Rp.0,- persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II 2022 adalah sebesar Rp. 4.424.188.827,- atau mencapai 99% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.478.117.000 ,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 1.715.159.325,- yang terdiri dari: Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 1.715.159.325,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,- Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 1.715.159.325,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 4.606.458.139,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (4.606.458.139). Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. (212.248.332),- dan Defisit Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp. (4.818.706.471),- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (4.818.706.471).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 2.315.884.157,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (4.818.706.471) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4.217.981.639, Kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp.(600.724.832)- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 1.715.159.325,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir

sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR KPU KABUPATEN SOLOK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEMESTER II 2022		% thd Angg	SEMESTER II 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	206.207.208	0,00	32.785.250
JUMLAH PENDAPATAN		-	206.207.208	0,00	32.785.250
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2.589.659.000	2.589.476.763	100	2.528.143.012
Belanja Barang	B.4	1.796.458.000	1.742.716.084	97	3.119.639.721
Belanja Modal	B.5	92.000.000	91.996.000	100	102.925.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja		4.478.117.000	4.424.188.847	98,80	5.750.707.733

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR KPU KABUPATEN SOLOK NERACA PER 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Saturday, 31 December 2022	Friday, 31 December 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9		418.455.540
Jumlah Aset Lancar		-	418.455.540
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	224.000.000	224.000.000
Peralatan dan Mesin	C.14	2.969.112.246	2.877.116.246
Gedung dan Bangunan	C.15	1.087.795.000	1.087.795.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(2.565.747.921)	(2.291.482.629)
Jumlah Aset Tetap		1.715.159.325	1.897.428.617
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	120.057.000	120.057.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(120.057.000)	(120.057.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		1.715.159.325	2.315.884.157
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	-	-
utang yang belum ditagih	C.25	-	-
utang jangka pendek lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	1.715.159.325	2.315.884.157
JUMLAH EKUITAS		1.715.159.325	2.315.884.157

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR KPU KABUPATEN SOLOK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	5.227
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.589.476.763	2.528.143.012
Beban Persediaan	D.3	52.452.260	64.074.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	535.882.885	2.921.867.771
Beban Pemeliharaan	D.5	57.089.401	87.150.350
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.097.291.538	46.020.900
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	274.265.292	356.707.942
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		4.606.458.139	6.003.963.975
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.606.458.139)	(6.003.958.748)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar	D.12	(212.248.332)	32.778.500
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		206.207.208	32.778.500
beban Pelepasan Aset Non Lancar		418.455.540	
pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya			1.523
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs			
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(212.248.332)	32.780.023
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.707.430.503)	(5.971.178.725)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB	D.13	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.818.706.471)	(5.971.178.725)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR KPU KABUPATEN SOLOK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS AWAL	E.1	2.315.884.157	3.911.854.219
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.818.706.471)	(5.971.178.725)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS			(82.472.038)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3	-	-
PENYESUAIAN NILAI KEWAJIBAN	E.4	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
LAIN-LAIN		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.5	-	-
KOREKSI ASET TETAP	E.6	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.7	-	(3.669.034)
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.8	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		-	(7.300.000)
Jumlah Lain-Lain		-	(71.503.004)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.9	4.217.981.639	4.457.680.701
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.10	(600.724.832)	(1.595.970.062)
EKUITAS AKHIR		1.715.159.325	2.315.884.157

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor KPU

Kabupaten Solok

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2022-2027 yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2022-2027 yang dituangkan melalui Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2022.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor KPU Kabupaten Solok berkomitmen dengan visi ***“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”***

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor KPU Kabupaten

Solok melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor KPU Kabupaten Solok menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor KPU Kabupaten Solok dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor KPU Kabupaten Solok. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor KPU Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan

berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor KPU Kabupaten Solok* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI SEMESTER II 2022	REALISASI SEMESTER II 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0,00
Pendapatan Lain-lain	-	32.785.250	0,00
Jumlah	-	32.785.250	0,00

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahun 2022

URAIAN	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real.Angg
Belanja Pegawai	2.589.659.000	2.589.476.763	99,99
Belanja Barang	1.796.458.000	1.742.716.084	97,01
Belanja Bantuan Sosial	92.000.000	91.996.000	
Belanja Modal			
Total Belanja Kotor	4.478.117.000	4.424.188.847	98,80
Pengembalian belanja	-		
Jumlah	4.478.117.000	4.424.188.847	98,80

Realisasi

Pendapatan

Rp. 206.207.208,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 206.207.208,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,- Pendapatan Kantor KPU Kabupaten Solok terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Realisasi Pendapatan Lain-lain Kantor KPU Kabupaten Solok mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berasal antara lain dari pendapatan Penjualan satu paket bilik suara berbahan aluminium dengan berat total 5.402 kg sebesar Rp. 206.207.208,- berdasarkan risalah lelang nomor 066/08/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan bukti penerimaan negara NTB

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI SEMESTER II 2022	REALISASI SEMESTER II 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0,00
Pendapatan Lain-lain	206.207.208	32.785.250	
Jumlah	206.207.208	32.785.250	0,00

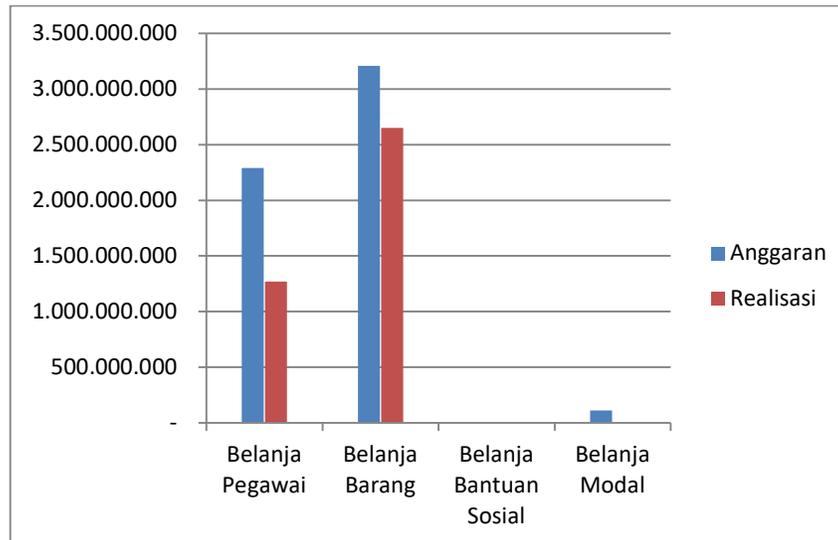
*Realisasi**Belanja Negara**Rp.**4.424.188.847,**,-***B.2 Belanja**

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2022 adalah sebesar Rp. 4.424.188.847,- atau 99,99% dari anggaran belanja sebesar Rp. 4.478.117.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester 2022

URAIAN	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real.Angg
Belanja Pegawai	2.589.659.000	2.589.476.763	99,99
Belanja Barang	1.796.458.000	1.742.716.084	97,01
Belanja Bantuan Sosial	92.000.000	91.996.000	
Belanja Modal			
Total Belanja Kotor	4.478.117.000	4.424.188.847	98,80
Pengembalian belanja	-		
Jumlah	4.478.117.000	4.424.188.847	98,80

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Semester II TA 2022 mengalami Penurunan yang tidak signifikan sebesar 23,07 % dibandingkan pada Semester II TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Telah selesainya Tahapan Pemilu Kepala daerah Tahun 2020 yang sisa anggarannya masih ada di Tahun 2021, sehingga pagu anggaran Tahun 2021 menjadi lebih besar dengan realisais mencapai 99%. Dengan demikian jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebenarnya penurunanny tidak signifikan jika dilihat dari realisasi keseluruhan.
2. Belanja pegawai mengalami kenaikan karena adanya perubahan status dari CPNS menjadi PNS di KPU kabupaten Solok sebanyak 2 orang.
3. Belanja barang untuk tahun 2022 tidak sebebsar tahun 2021 karena di tahun 021 terdapat anggaran hibah pilkada yang masih bersisa.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	SEMESTER II 2022	SEMESTER II 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.589.476.763	2.528.143.012	2,43
Belanja Barang	1.742.716.084	3.119.639.721	(44,14)
Belanja Modal	91.996.000	102.925.000	(10,62)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	4.424.188.847	5.750.707.733	(23,07)

Belanja

Pegawai Rp.

2.589.476.763,

-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.589.476.763,- dan Rp.2.528.142.886,- Realisasi belanja Semester II TA 2022 mengalami Kenaikan sebesar 2,43% dari Semester II TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Terjadinya perubahan status pegawai dari CPNS menjadi PNS sebanyak 2 orang
- Pembayaran Tukin Ke 13 dan Tukin THR
- Kenaikan Pembayaran THR dan Gaji ke 13 Anggota KPU menjadi 80%

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	709.952.640	712.760.760	(0,39)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.444	10.967	13,47
Belanja Tunj. Suami/ Istri PNS	67.427.562	68.387.148	(1,40)
Belanja Tunj. Anak PNS	21.370.712	21.180.274	0,90
Belanja Tunj. Struktural PNS	47.880.000	47.880.000	-
Belanja Tunj. PPh PNS	1.165.285	1.063.900	
Belanja Tunj. Beras PNS	52.866.600	54.821.940	(3,57)
Belanja Uang Makan PNS	105.890.000	122.135.000	(13,30)
Belanja Tunjangan Umum PNS	26.500.000	28.350.000	(6,53)
Belanja Uang Lembur	26.317.000	24.560.000	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) / UK	1.530.094.520	1.446.993.023	5,74
Jumlah Belanja Kotor	2.589.476.763	2.528.143.012	2,43
Pengembalian Belanja Pegawai		126	(100,00)
Jumlah Belanja	2.589.476.763	2.528.142.886	2,43

*Belanja
Barang Rp.
1.742.716.084
,-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.742.716.084,- dan Rp. 3.119.639.721,-. Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2022 mengalami penurunan 44,14% dari Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2021. Hal ini antara lain disebabkan oleh telah berakhirnya Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2021 yang bersumber dari dana hibah sedangkan untuk tahun 2022 baru memasuki tahapan pemilu.

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

URAIAN	Realisasi Semester II 2022	Realisasi Semester II 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	31.718.000	208.414.800	(84,78)
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	18.500	42.000	(55,95)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	110.520.000	121.080.000	(8,72)
Belanja Barang Operasional Lainnya	19.035.000	18.516.000	2,80
Belanja Bahan	75.734.000	23.826.500	217,86
Honor Output Kegiatan	51.400.000	100.900.000	(49,06)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	159.875.350	2.342.355.782	(93,17)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	52.452.260	64.074.000	(18,14)
Belanja Langganan Listrik	36.397.011	44.522.645	(18,25)
Belanja Langganan Telepon	22.462.024	22.353.444	0,49
Belanja Langganan Air	5.366.000	5.699.600	(5,85)
Belanja Sea	0	200.000	(100,00)
Belanja Jasa Profesi		600.000	
Belanja Jasa Lainnya	635.000	23.797.000	
Belanja Penanganan Pandemi Covid	22.740.000	27.560.000	
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.490.000	80.000.000	(86,89)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.759.401	7.150.350	539,96
Belanja perjalanan biasa	878.225.878	46.020.900	1.808,32
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.300.000	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	207.765.660	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.742.716.084	3.119.639.721	(44,14)
Pengembalian Belanja			-
Jumlah Belanja	1.742.716.084	3.119.639.721	(44,14)

*Belanja Modal
Rp.
91.996.000,-*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 91.996.000- dan Rp 102.925.000 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester II TA 2022 mengalami penurunan di bandingkan tahun 2021, karena di Tahun 2022 pagu yang tersedia untuk belanja peralatan modal dan mesin tidak sebanyak tahun 2021 yang berasal dari hibah

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI Semester II T.A. 2022	REALISASI Semester II T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	224.000.000	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.996.000	102.925.000	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.087.795.000	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya		-	-
Jumlah Belanja Kotor		-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	91.996.000	1.414.720.000	0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2022 dan Semester II TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 224.000.000,- . Ditahun 2022, KPU Kabupaten Solok tidak melakukan belanja modal tanah. Sedangkan di tahun 2021 adanya belanja tanah merupakan hibah tanah dari pemerintah daerah Kabupaten Solok, yang saat ini telah deregister dan juga telah diperoleh sertifikatnya.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 91.996.000 dan Rp.102.925.000,-. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II Tahun 2022 adalah pembelian 4 unit notebook Lenovo ideapad flex 5i dan 2 unit printer HP Laser Jet dan juga 2 unit Air

Conditioner dengan merek LG.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2022 dan Semester II TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 1.087.795.000,00 Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2022 tidak ada realisasi, karena di Tahun 2021 KPU Kabupaen Solok telah menerima hibah bangunan dari Pemda Solok dan telah deregister.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II Tahun 2022 tidak mengalami perubahan karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tidak menerima Anggaran Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan pengadaan *software* untuk mendukung implementasi akuntansi pendapatan berbasis akrual.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp. 0*

B.5.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat

untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0% dibandingkan Semester II TA 2021. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0,-*

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bank BRI Cabang Solok	-	-
Uang Tunai	-	-
Kuitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp. 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tidak memiliki Bendahara Penerimaan.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp. 0,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	Semester I TH 2022	TH 2020
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	-
Pajak PPh yang belum disetor	-	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	-
Hibah Langsung dalam bentuk uang	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBP Rp. 0

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2022 dan 2021

Uraian	TH 2020	TH 2020
Piutang PNPB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp. 0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- . Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR.

*Bagian Lancar
TPA
Rp. 0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp. 0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp. 0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	Semester I 2022	Semester I 2021
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp .0,-*

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Persediaan
Rp. 0,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp.418.455.540,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/diserahkan ke masyarakat	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	418.455.540
Jumlah	-	418.455.540

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan telah dilakukan penghapusan oleh operator persediaan melalui prosedur lelang barang berupa Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2020 dengan nilai Rp.206.207.208,- yang akan dijelaskan dengan rinci pada bagian PNPB.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp. 0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Kantor KPU Kabupaten Solok tidak memiliki Tagihan Penjualan Anggsuran.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp. 0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

KPU Kabupaten Solok tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang.

Tanah

Rp. 224.000.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.224.000.000,- dan Rp.224.000.000 tidak terjadi perubahan atau penambahan asset tanah pada KPU Kabupaten Solok di tahun 2022.

Peralatan dan

Mesin

Rp.

2.969.112.246,

-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 2.969.112.246,- dan Rp. 2.877.116.246,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	2.877.116.246
Mutasi tambah:	
Pembelian	91.996.000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2022	2.969.112.246
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2.969.112.246

Terdapat penambahan saldo untuk peralatan dan mesin dari tahun 2021 ke tahun 2022, dimana di tahun 2022 telah di lakukan belanja modal sebesar 91.996.000 untuk pembelian 4 unit notebook Lenovo ideapad i5, 2 unit printer HP Laser Jet dan 2 unit AC LG.

*Gedung dan
Bangunan
Rp.
1.087.795.000,-*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.1.087.795.000,- dan Rp. 1.087.795.000,- Tidak terjadi penambahan atau pengurangan nilai gedung dan bangunan KPU Kabupaten Solok dari tahun sebelumnya..

*Jalan,Jaringan
dan Irigasi
Rp.0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Rincian Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp.
0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp.
2.565.747.921,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp. 2.565.747.921 dan Rp. Rp. 2.291.482.629,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.969.112.246	2.522.236.121	446.876.125
2	Gedung dan Bangunan	1.087.795.000	43511800	1.044.283.200
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya			0
Akumulasi Penyusutan		4.056.907.246	2.565.747.921	1.491.159.325

Aset Tak
Berwujud

Rp.0,-

Aset Lain-Lain
Rp. 120.057.000-

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset **Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember** 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0 . Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 120.057.000- dan Rp. 120.057.000,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	120.057.000
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2022	120.057.000
Akumulasi Penyusutan	(120.057.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi (peralatan dan mesin yang rusak).

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.120.057.000-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp. (120.057.000) dan Rp. (120.057.000) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	120.057.000	120.057.000	0
Jumlah	120.057.000	120.057.000	0

Ekuitas Rp. 1.715.159.325,-

C.24 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. Rp.1.715.159.325 dan 2.315.884.157,- . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBPN Rp.0,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D. 1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-.

*Beban
Pegawai Rp.*

*2.589.476.763,
-*

D. 2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Semester II 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.589.476.763,- dan Rp. 2.528.143.012 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Semester I 2022	Semester I Tahun 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	2.589.659.000	2.528.143.012	0,98
Beban Tunjangan-Tunjangan			
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	
Beban Lembur			-
Realisasi Belanja Bruto	2.589.659.000	2.528.143.012	0,98
<i>Pengembalian Belanja</i>		60	-
Realisasi Belanja Netto	2.589.659.000	2.528.142.952	0,98

*Beban
Persediaan Rp.*

52.452.260,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Semester II 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 52.452.260,- dan Rp.64.074.000,-Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester II 2021 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER II TH 2022	SEMESTER II TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	52.452.260	64.074.000	(18,14)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	52.452.260	64.074.000	(18,14)

Beban Barang dan Jasa Rp. 535.882.885,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa Semester II 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 535.882.885 dan Rp. 2.921.867.771- Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Semester II 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Semester II 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER II 2022	SEMESTER II 2021	NAIK (TURUN)
beban Keperluan Perkantoran	31.718.000	208.414.800	-84,
beban Honor Operasional Satuan Kerja	110.520.000	121.080.000	-8,
beban Barang Operasional Lainnya	19.035.000	18.516.000	2,
beban Bahan	75.734.000	23.826.500	217,
Beban Operasional Penanganan Covid	22.740.000	27.560.000	-17,
beban Honor Output Kegiatan	51.400.000	100.900.000	-49,
beban Langganan Listrik	36.379.011	44.522.645	-18,
beban Langganan Telepon	22.462.024	22.353.444	0,
beban Langganan Air	22.462.024	5.699.600	294,
Beban Sewa	-	200.000	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18.500	42.000	
Beban Yang masih harus dibayar	-	-	
Beban Jasa Profesi	-	600.000	
Beban Barang Non Operasional Lainnya	159.875.350	2.324.355.782	-93,
Beban Jasa Lainnya	-	23.797.000	
Jumlah	535.882.885	2.921.867.771	543,

*Beban
Pemeliharaan
Rp.
57.089.401-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Semester II 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 57.089.401,- dan Rp. 87.150.350,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Semester II 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Semester II 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER I 2022	SEMESTER II 2021	NAIK (TURUN) %
beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.490.000	12.520.000	-16,21
beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.795.401	74.025.350	-38,14
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	605.000	0,00
Jumlah	57.089.401	87.150.350	-34,49

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp
1.097.291.538
,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Semester II 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.097.291.538,- dan Rp.46.020.900,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester II 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER II 2022	SEMESTER II 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	878.225.878	24.800.900	3441,10
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.300.000	12.390.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	207.765.660	8.830.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Jumlah	1.097.291.538	46.020.900	2284,33

dari table diatas dapat dilihat adanya kenaikann dalam persentase perjalanan dinas, karena di tahun 2022

dengan telah dimulainya tahapan pemilu 2024 maka beban perjalanan dinas juga semakin besar ditambah dengan kondisi pandemic covid 19 yang sudah mereda dan tidak ada lagi larangan mengadakan kegiatan diluar.

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp. 0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi.

*Beban
Bantuan
Sosial Rp. 0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Semester I 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 274.265.292-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester II 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 274.265.292,- dan Rp. 356.680.942,- Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester II 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2022 dan 2021*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	SEMESTER II 2022	SEMESTER II 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	152.111.374	334.925.042	-54,58%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.877.950	21.755.900	0%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	0%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0%
Jumlah Penyusutan	274.265.292	356.680.942	-23,11%
			0%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	0%
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0%
Jumlah Amortisasi	-	-	0%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	274.265.292	356.680.942	-23,11%

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp. 0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester II 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban Lain-lain Rp.0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Semester II 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. - 212.248.332,-

D.12 Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Semester II 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.-212.248.332,- dan Rp. 32.778.500 terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Pos Luar Biasa Rp. 0

D.13 Pos Luar Biasa

PosLuar Biasa Semester II 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Ekuitas Awal Rp. 2.315.884.157,-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.315.884.157 - dan Rp. 3.911.854.219,-

Defisit LO

Rp.

(4.818.706.47

1)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. (4.818.706.471) Rp (5.971.178.725,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luarbiasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk Semester II 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp. 0

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk SemesterI II 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih

E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset
Tetap

Rp. 0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Semester II 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi sebidang tanah milik satker.

Koreksi Aset
Tetap Non

Revaluasi

Rp. 0

E.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Semester II 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 7.300.000. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-
Lain Rp.0

E.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Semester II 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 71.503.004. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

*Koreksi atas
reklasifikasi*

Rp.0

E.8 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada semester II 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. (3.669.034).

*Transaksi
Antar Entitas*

Rp.

4.217.981.639

,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.217.981.639 , - dan Rp. 4.457.680.701 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	4.217.981.639
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	4.217.981.639

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Kantor Akuntansi Denpasar	-
3	Persediaan	Deputi Akuntansi	-
Jumlah			-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0 yang merupakan transfer Persediaan kepada Deputi Sistem dan Peraturan Akuntansi.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung

entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp. 0,-

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Pemerintah Daerah Kab.Solok	Uang	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir

Rp.

1.715.159.325

'-

E.9 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada Semester II 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.715.159.325,- dan Rp. 2.315.884.157,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada Semester I 2022 tidak terdapat temuan BPK sehingga tidak ada tindak lanjut temuan dari BPK terhadap Laporan Keuangan Semester yang lalu.

F.2 Kejadian – Kejadian Penting

1. Migrasi dan Reformasi Pengelolaan Keuangan

Pada akhir Desember Tahun 2021 Kegiatan pengelolaan keuangan telah bermigrasi dari yang awalnya

menggunakan aplikasi berbasis desktop ke aplikasi berbasis web SAKTI. Perubahan signifikan ini sedikit banyak sangat berpengaruh terhadap cara dan pengelolaan keuangan. Terdapat sisi positif dan negative penggunaan aplikasi ini. Secara umum aplikasi ini sangat praktis karena memiliki satu data base tunggal. Pengaksesan aplikasi mudah dan bisa kapan saja dibandingkan dengan aplikasi berbasis desktop. Selain itu aplikasi ini juga memiliki kelebihan, Akuntansi berbasis akrual, Interkoneksi dengan SPAN, Tidak perlu mengelola banyak aplikasi, Tidak perlu ke KPPN berkali-kali, Satu basis data untuk semua modul, Satu basis data untuk semua unit. Namun, kendala dalam penggunaan aplikasi ini adalah SDM yang belum memahami aplikasi ini, dan banyaknya role yang ada juga menuntut banyak SDM sedangkan SDM yang ada di KPU sangat terbatas. Kemudian system OTP sering kali menghambat proses kerja jika pemegang OTP tidak sedang dikantor atau tidak menggunakan HP.

Selanjutnya, pada saat migrasi data dan penyusunan LK, banyak kejadian dan error system seperti data hilang dan tiba-tiba menjadi 0 untuk modul asset, dan untuk perbaikan ini mesti melapor ke Hai DJPB yang responnya sangat lama, karena melayani seluruh keluhan Sakti se Indonesia, dan akibatnya menghambat proses penyusunan LK.

Kemudian untuk selanjutnya, penggunaan aplikasi ini hingga akhir tahun terhitung lancar karena sudah terbiasa dengan menu-menu aplikasi, namun untuk beberapa kejadian atau kendala hal-hal ini harus dikonsultasikan ke Hai DJPB secara online yang responnya terhitung lama, sehingga menghambat kerja pengelolaan keuangan seperti masalah rekon dengan

KPPN.

2. Perubahan signifikan dalam kepegawaian

Pada Tahun 2021, KPU Kabupaten Solok menerima 2 CPNS, dan pada tahun 2022 kedua CPNS ini telah resmi menjadi PNS, dan tentu diikuti dengan hak-hak yang diperoleh, hal ini berakibat pada kenaikan belanja pegawai.

Pada Tahun yang sama di KPU Kabupaten Solok terdapat mutasi satu orang pegawai ke KPU Kabupaten Solok Selatan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap komponen beban belanja pegawai.

3. Pagu anggaran yang di Lock

Berhubung dengan tahapan pemilihan yang akan dimulai, melalui kebijakan KPU RI, maka ada beberapa pagu anggaran yang di lock oleh KPU RI, dengan demikian anggaran ini tidak bisa digunakan. Namun, sejalan dengan hal tersebut banyak kegiatan yang mesti dilakukan, sedangkan anggaran tidak dapat digunakan, hal ini menyebabkan banyak pembayaran yang belum dilakukan sampai pagu diizinkan untuk digunakan oleh KPU RI. Hal ini berdampak pada realisasi anggaran dan kegiatan yang bertumpuk pada akhir bulan yakni Oktober-Desember.

4. Pagu Minus

Pada akhir tahun 2022, pada satker KPU Kabupaten Solok terdapat pagu minus pada akun gaji pokok pegawai. Adanya pagu minus ini karena keterlambatan melakukan revisi dan juga karena pembayaran belanja pegawai berupa Tunjangan Kinerja di Bulan Desember. Oleh karena ini realisasi KPU Kabupaten Solok pada bulan desember mencapai 99,9%. Kemudian pada awal tahun 2023, dilakukan revisi pagu minus sehingga

setelah dilakukan revisi pagu minus realisasi menjadi 98,80%.

F.3 Pengungkapan Lain-Lain

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 009/BALAP.5/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 018/BALAP.5/2016 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor KPU Kabupaten Solok sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	<u>Efrizon, SH. M.Si</u> NIP. 19660920 198602 1 003
Pejabat Pembuat Komitmen	:	<u>Giffa Lania, SH</u> NIP. 19871009 201012 2 003
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	:	<u>Nora Susanti, SE</u> NIP. 19740910 200701 2 003
Bendahara	:	<u>Yona Frima Diana, SE</u> NIP. 19810304 201012 2 002
Staf Pengelola Keuangan	:	<u>Novita Sari, S.IP</u> NIP. 19941127 202112 2 010
Staf Pengelola Keuangan	:	<u>Afrizal</u> NIP. 19780411 200701 1 002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN S O L O K 656091

Waktu Olap: 2023-02-11 07:55:34.0 [B@69051d2a
 Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 11/02/23 10:29 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	4,478,117,000	4,424,188,847	53,928,153	99	5,753,399,000	5,750,707,733	2,691,267	100
C	PEMBIAYAAN				0				0

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 0800 **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 656091 **KPU KABUPATEN S O L O K**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 11/02/23 10:23 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
 Tgl Data : 11/02/23 8:00 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	5,227	(5,227)	(100)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	5,227	(5,227)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	5,227	(5,227)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,589,476,763	2,528,143,012	61,333,751	2.426
Beban Persediaan	52,452,260	64,074,000	(11,621,740)	(18.138)
Beban Barang dan Jasa	535,882,885	2,921,867,771	(2,385,984,886)	(81.66)
Beban Pemeliharaan	57,089,401	87,150,350	(30,060,949)	(34.493)
Beban Perjalanan Dinas	1,097,291,538	46,020,900	1,051,270,638	2,284.333
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 0800 **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 656091 **KPU KABUPATEN S O L O K**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 11/02/23 10:23 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
 Tgl Data : 11/02/23 8:00 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	274,265,292	356,707,942	(82,442,650)	(23.112)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,606,458,139	6,003,963,975	(1,397,505,836)	(23.276)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,606,458,139)	(6,003,958,748)	1,397,500,609	(23.276)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(212,248,332)	32,778,500	(245,026,832)	(747.523)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	206,207,208	32,778,500	173,428,708	529.093
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	418,455,540	0	418,455,540	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,523	(1,523)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,523	(1,523)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(212,248,332)	32,780,023	(245,028,355)	(747.493)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,818,706,471)	(5,971,178,725)	1,152,472,254	(19.301)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,818,706,471)	(5,971,178,725)	1,152,472,254	(19.301)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 0800 **SUMATERA BARAT**
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 656091 **KPU KABUPATEN S O L O K**

Tgl Data : 11/02/23 8:00 AM
Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 11/02/23 10:29 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,315,884,157	3,911,854,219	(1,595,970,062)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,818,706,471)	(5,971,178,725)	1,152,472,254	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(82,472,038)	82,472,038	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(3,669,034)	3,669,034	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(7,300,000)	7,300,000	-
LAIN-LAIN	0	(71,503,004)	71,503,004	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,217,981,639	4,457,680,701	(239,699,062)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(600,724,832)	(1,595,970,062)	995,245,230	-
EKUITAS AKHIR	1,715,159,325	2,315,884,157	(600,724,832)	-

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 656091

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SUMATERA BARAT
KPU KABUPATEN S O L O K

Tgl Data 11/02/23 7:50 AM
Tgl. Cetak 11/02/2023 10:30 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	224,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,969,112,246	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,087,795,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,522,236,121
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	43,511,800
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	120,057,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	120,057,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,424,188,847
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	206,207,208	0
0.0	391111	Ekuitas	0	2,315,884,157
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	206,207,208
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	709,952,640	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12,444	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	67,427,562	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	21,370,712	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,165,285	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	52,866,600	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	105,890,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	26,500,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	802,730,500	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	26,317,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	727,364,020	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	31,718,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	110,520,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	19,035,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	22,740,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	75,734,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	51,400,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	159,875,350	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	36,379,011	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	22,462,024	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	5,366,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	635,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,490,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45,759,401	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	878,225,878	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 656091

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SUMATERA BARAT
KPU KABUPATEN S O L O K

Tgl Data 11/02/23 7:50 AM

Tgl. Cetak 11/02/2023 10:30 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,300,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	207,765,660	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	252,509,392	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21,755,900	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	52,452,260	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	840,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	418,455,540	0
JUMLAH			9,632,085,133	9,632,085,133



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 656091
SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,478,117,000	4,478,117,000	0
2	Belanja	4,424,189,178	4,424,189,178	0
3	Pengembalian Belanja	-331	-331	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	206,207,208	206,207,208	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-23





BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700221231321275
Tanggal Billing : 31-12-2022 13:49
Tanggal Kadaluausa : 07-01-2023 23:59
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Penyetor : YONA FRIMA DIANA
Kementerian / Lembaga : 076-KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I : 01-KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 656091-KPU KABUPATEN S O L O K
Total Disetor : 31.883.694 (IDR)
Terbilang : Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah (IDR) //
Status : BELUM TERBAYAR
NTPN : -
NTB : -
KPPN : SOLOK
Keterangan : Penyetoran Sisa TUP KPU Kabupaten Solok TA 2022

Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran
Uraian : Periode : 122022 s/d 122022
Akun : 815511 - Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan
Jumlah Setoran : 31.883.694 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. SOLOK 27300

491720052

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 31-12-2022 14:21:50
No. Resi : 27300-46/2022/836772 Petugas : 550000327

Tanggal Buku : 31-12-2022 NTP : 924991928071
Kode Cabang Pos : 027300 NTPN : 3AF15520A8M04K5R
STAN : 928071

Waktu Transaksi : 31-12-2022 14:21:48

Kode Billing : 700221231321275

Nama Wajib Bayar : YONA FRIMA DIANA

K / L : 076

Unit Eselon : 01

Kode Setor : 656091

Jumlah Setoran : Rp. 31.883.694 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)

HP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTOR POS



PBIX/2022

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEUANGAN

Data Pembayaran:

Tanggal Jam Bayar : 30/12/2022 16:45:03 NTB : 221230063330

Tanggal Buku : 30/12/2022 NTPN : B5C778JM9J0AJOFV

Kode Cab. Bank : 0091 STAN : 401566

Data Setoran:

Kode Billing : 700221230113279

Nama Wajib Bayar : YONA FRIMA DIANA

Kementerian/Lembaga : 076

Unit Eselon I : 01

Satuan Kerja : 656091

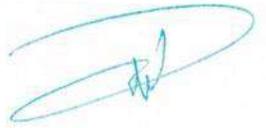
Jumlah Setoran : Rp. 53,745,916.00 Mata Uang : IDR

Terbilang : LIMA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU
SEMBILAN RATUS ENAM BELAS RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

YONA FRIMA DIANA 0000 0000 53745916.00 30122022 30122022 B5C778JM9J0AJOFV
 221230063330 401566 139



REZZA
TELLER

032901003434307 REK PERSEPSI NTPN : B5C778JM9J0AJOFV
 CASH IDR 53,745,916.00 DT
 0091 0091164 8736 4000015 30122022 164503



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700221230113279
Tanggal Billing : 30-12-2022 16:15
Tanggal Kadaluarsa : 06-01-2023 23:59
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Penyetor : YONA FRIMA DIANA
Kementerian / Lembaga : 076-KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I : 01-KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 656091-KPU KABUPATEN S O L O K
Total Disetor : 53.745.916 (IDR)
Terbilang : Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah (IDR)
Status : BELUM TERBAYAR
NTPN : -
NTB : -
KPPN : SOLOK
Keterangan : Setoran Sisa TUP RM Satker KPU Kabupaten Solok TA 2022

Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran
Uraian : Periode : 122022 s/d 122022
Akun : 815511 - Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan
Jumlah Setoran : 53.745.916 (IDR)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://haikemenkeu.go.id/>.

Keluar